

Rekomendasi Dijalankan

50 Pelaksana Penempatan TKI Swasta Ditindak

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah terus menjalankan sebagian rekomendasi pembenahan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia dari Badan Pemeriksa Keuangan. Saat ini, pemerintah terus memperkuat peranan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia serta pemerintah daerah untuk mencegah calon TKI yang belum siap bekerja ke luar negeri.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menegaskan hal ini di Jakarta, Sabtu (25/6). BPK meminta pemerintah membenahi persoalan TKI secara komprehensif dari hulu ke hilir agar tidak muncul persoalan berulang.

BPK memberikan 14 rekomendasi pembenahan penempatan dan perlindungan TKI dalam hasil audit semester II-2010 yang disampaikan kepada pemerintah bulan April lalu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresponsnya dengan membentuk tim terpadu tiga bulan lalu.

"Rekomendasi BPK terus ditindaklanjuti. Sebagian besar rekomendasi telah kami laksanakan, seperti pelaksanaan asuransi TKI yang perang diskon sampai perdagangan sertifikat palsu dan pelatihan," ujar Muhaimin.

Kemnakertrans telah melimpahkan sebagian kewenangannya dalam operasional tenaga kerja Indonesia di luar negeri kepada BNP2TKI. Kewenangan regulasi dan pengawasan tetap berada di Kemnakertrans.

Izin usaha dicabut

Pelimpahan kewenangan itu juga merupakan upaya mengatasi tumpang tindih operasional antara BNP2TKI dan Kemnakertrans. Berbagai upaya pembenahan diiringi pengetatan persyaratan bagi calon pengguna jasa TKI di luar negeri sejak Januari 2011 masih akan berlanjut.

"Kami sudah membekukan dan mencabut izin usaha sedikitnya 50 pelaksana penempatan TKI swasta. Kami terus mengawasi mereka sampai tinggal yang sehat yang beroperasi," ujar Mennakertrans.

Penguatan peranan pemerintah daerah di 38 kabupaten/kota sumber utama calon TKI juga penting. Kemnakertrans mengarahkan berbagai program untuk menekan minat bekerja ke luar negeri, antara lain, pengembangan kewirausahaan, desa produktif, dan transmigrasi.

Pemda memegang peranan penting dalam menjamin keaslian dokumen identitas, melaksanakan pelatihan kompetensi kerja lewat Balai-balai latihan

Penguatan Peranan Pemerintah Daerah di Daerah Sumber Utama Calon TKI

- Pengembangan kewirausahaan.
- Pengembangan desa produktif dan transmigrasi.
- Menjamin keaslian dokumen identitas.
- Melaksanakan pelatihan kompetensi kerja lewat Balai-balai latihan kerja.
- Membangun bank data pencari kerja sesuai kompetensi mulai tingkat kecamatan hingga provinsi.



Sumber: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

FOTO: KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD; GRAFIK: NOVAN

kerja, sampai membangun bank data pencari kerja sesuai kompetensi, mulai tingkat kecamatan hingga provinsi. Langkah ini menghapuskan peran sponsor calon TKI dan mendorong kontrol pemda atas warganya yang ingin bekerja ke luar negeri.

Muhaimin menegaskan, pemerintah akan memerhatikan adanya kekhawatiran penyusunan nota kesepahaman perlindungan TKI pekerja rumah tangga dengan Arab Saudi tidak akan berkualitas karena sekadar untuk mencabut moratorium. "Saya punya rencana, MOU itu akan mengatur hak normatif TKI dengan detail. Jadi, deskripsi kerja, jam kerja, asuransi di Arab Saudi, sampai transfer pembayaran gaji harus tercantum agar hak TKI terpenuhi dengan baik," ujarnya.

Secara terpisah, Kepala

BNP2TKI Mohammad Jumhur Hidayat menjelaskan, pihaknya mulai membangun sistem informasi data calon TKI yang bisa diakses lewat jaringan komputer dari tingkat kabupaten/kota sampai ke luar negeri. Rekomendasi BPK yang lain, seperti wajib kartu tenaga kerja luar negeri, juga sudah berjalan.

"Kami sudah pernah mengusulkan pembuatan pusat pengaduan lewat Indonesian Social Security Program untuk melindungi TKI di luar negeri. Jika program ini berjalan, kita bisa memantau TKI lewat telepon ke rumah pengguna jasa dan bisa tahu ada masalah sejak awal bila petugas tak bisa berbicara langsung dengan TKI setelah ditelepon," ujar Jumhur.

(HAM/BIL/WIE/ETA/SIR/OHE/ODY)